

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tragedi lumpur lapindo di Kabupaten Sidoarjo terjadi hampir 16 tahun tepat pada tanggal 29 Mei 2006 sampai sekarang, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan berhenti. Semburan lumpur tersebut diduga berawal dari keluarnya asap kebocoran pipa dari pengeboran PT Lapindo Brantas (Daulay 2010).

Semburan lumpur lapindo berada di daerah pemukiman padat penduduk, bahkan di beberapa titik merupakan kawasan perumahan (residence), diperkirakan volume lumpur yang menggenangi lebih dari 27 juta m<sup>3</sup> (Shofwan 2014).

Kecamatan Porong menjadi wilayah yang paling terdampak atas menyemburnya lumpur panas yang terjadi. Hal itu menjadi awal bencana yang terus berkelanjutan hingga menenggelamkan beberapa desa antara lain Renokenongo, Siring, Jatirejo, Glagaharum, Kedungbendo, ketapang, Besuki. Beberapa desa yang dekat dengan wilayah semburan lumpur pun juga ikut terkena imbasnya yakni munculnya semburan lumpur baru, semburan air, semburan gas beracun, tanah amblas yang mengakibatkan kerusakan rumah dan fasilitas umum, tercemarnya sumber air, serta tersumbatnya saluran irigasi (Batubara and Utomo Waluyo 2012).

Bencana luapan lumpur di Kabupaten Sidoarjo menyisahkan berbagai macam persoalan, termasuk diantaranya perubahan tatanan ruang disekitar kawasan luapan lumpur khususnya perubahan pola permukiman komunal masyarakat korban. Perubahan pola permukiman komunal ini didasari atas permasalahan primer maupun sekunder, permasalahan primer karena permukiman masyarakat korban yang terendam lumpur secara langsung maupun permasalahan sekunder karena dampak lanjutan dari luapan lumpur seperti wilayahnya yang tercemar tanah, tercemar air, maupun mengalami amblesan (Shofwan and Rukmana 2017).

Dampak dari kejadian lumpur lapindo demikian besar bagi masyarakat baik itu dampak fisik, dampak sosial, dampak psikologis, lingkungan, dan dampak ekonomi. Tekanan yang begitu kuat dengan keadaan yang kacau balau membuat masyarakat depresi harus menerima kenyataan pahit kehilangan rumah beserta harta bendanya (Suryaningsih dan Baiq Lily Handayani 2017).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa semburan lumpur secara bertahap telah menggenangi 12 desa yang terletak di 3 kecamatan yaitu Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Semburan lumpur dalam kurun waktu tujuh tahun telah menggenangi kawasan seluas 601 ha, dengan perincian 10.641 KK (kurang lebih 39.700 jiwa) harus kehilangan tempat tinggal, 11.241 bangunan dan 362 ha sawah tenggelam. Lumpur juga memutus ruas jalan tol Porong-Gempol, yang merupakan jalur utama transportasi yang menghubungkan Surabaya dengan kota Sidoarjo, Malang, dan Pasuruan (BPLS, 2013).

Desa tangguh bencana sendiri didefinisikan sebagai unit terkecil permukiman di area pedesaan yang warganya memiliki karakter pantang menyerah dan motivasi tinggi untuk menanggulangi bencana (Sulistiyowati and Ekawat 2021). atau suatu desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi menghadapi potensi ancaman bencana dan segera pulih dari dampak yang merugikan (Prastika 2020)

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi kelompok secara mental dan emosi dimana seseorang itu sebagai pendorong untuk mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya (Astuti Irene 2011). Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam keberlanjutan program yang berbasis masyarakat (Anggriani dan Mei, 2018).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan desa dalam pengelolaan risiko bencana ?
- b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat menuju desa tangguh bencana di kawasan terdampak lumpur lapindo ?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan desa dalam pengelolaan resiko bencana;
- b. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat menuju desa tangguh bencana di kawasan terdampak lumpur lapindo;

### **2. Manfaat**

Manfaat dalam penelitian:

#### a. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam upaya meminimalkan dampak lanjutan (sequential), sehingga apabila terjadi bencana alam serupa maka bisa mereduksi dampak yang ditimbulkan.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan agar desa-desa terdampak bencana lumpur lapindo bisa meningkatkan kapasitasnya dalam mengatasi kerentanan terhadap bahaya dan dampak bencana untuk mewujudkan desa tangguh.

#### c. Bagi Akademik

Sebagai bahan sumber acuan untuk penelitian-penelitian terkait serta penerapan pada mata kuliah yang didapat

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian akan dibahas mengenai batasan-batasan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup spasial dan ruang lingkup substansi. Lingkup spasial merupakan penjelasan mengenai batasan wilayah penelitian yang akan dikaji, sedangkan lingkup substansi merupakan penjelasan mengenai batasan substansi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

## 1. Ruang Lingkup spasial

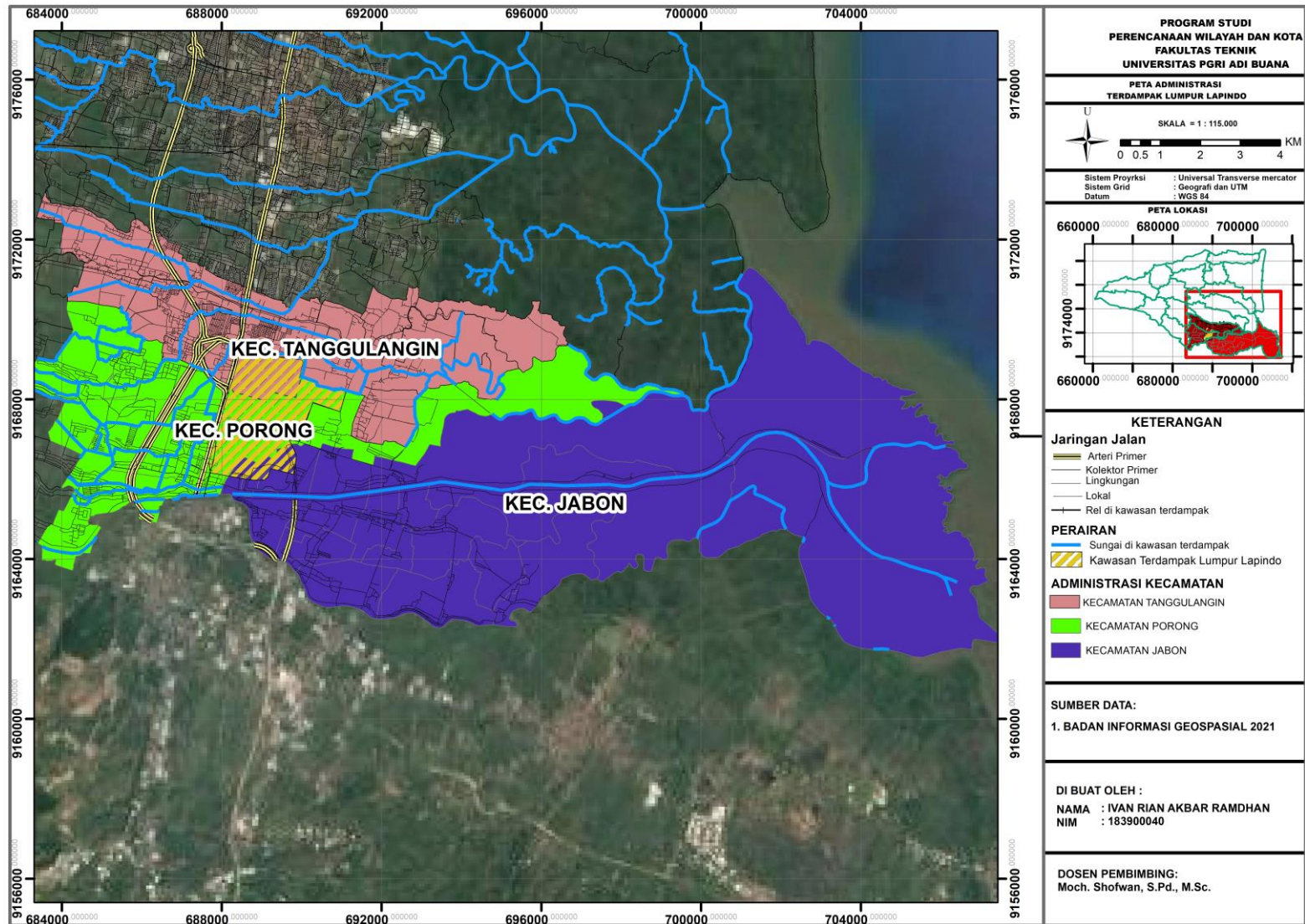
Kecamatan Tanggulangin berada di sebelah selatan dari Kabupaten Sidoarjo, hanya berjarak 9 km dari pusat Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Tanggulangin memiliki batas-batas:

- Sebelah utara : Kecamatan Candi
- Sebelah selatan : Kecamatan Porong
- Sebelah timur : Kecamatan Candi dan Porong
- Sebelah Barat : Kecamatan Tulangan

Kecamatan Porong berada di sebelah selatan dari Kabupaten Sidoarjo, hanya berjarak 12 km dari pusat Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah penduduk 73.446 jiwa. Kecamatan Porong memiliki 13 Desa dan 6 kelurahan. Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Porong memiliki batas-batas :

- Sebelah utara : Kecamatan Candi dan Tanggulangin
- Sebelah selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah timur : Selat madura
- Sebelah barat : Kecamatan krembung

Kecamatan Jabon merupakan kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang berada di sebelah selatan. Wilayahnya terputus oleh sungai porong dari dataran induk Kabupaten Sidoarjo, sehingga kecamatan ini lebih mendekati wilayah Ibukota Kabupaten Pasuruan, Bangil.



Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon

## 2. Ruang Lingkup Substansi

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menurut modul indikator penilaian ketangguhan berencana desa (BNPB, 2019) bahwa dalam menentukan kebijakan desa tangguh dalam pengelolaan risiko bencana di kawasan terdampak lumpur lapindo sebagai berikut:
  - 1) penanggulangan bencana;
  - 2) regulasi desa;
  - 3) jalur evakuasi;
  - 4) mekanisme peringatan bencana.
- b. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat menuju desa tangguh bencana di kawasan lumpur lapindo menggunakan konsep delapan tangga menurut teori Sherry Arnstein (1971) sebagai berikut:
  - a. *Manipulation;*
  - b. *Therapy;*
  - c. *Informing;*
  - d. *Consultation;*
  - e. *Placation;*
  - f. *Partnership*
  - g. *Delegated power;*
  - h. *Citizen control*